

Nomor : e.T/KL.00.02/008/DK/III/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Prediksi Musim Kemarau 2026

Jakarta, 16 Maret 2026

Yth. Bapak/Ibu (daftar terlampir)
di
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat Kepala BMKG kepada Bapak Presiden RI bernomor e.B/KL.01.00/001/KB/III/2026 mengenai Prediksi Musim Kemarau 2026, bersama ini kami sampaikan informasi Perkembangan Iklim dan Prediksi Musim Kemarau 2026, sebagai bahan pertimbangan dalam mendukung strategi kebijakan pembangunan sektor-sektor, maupun untukantisipasi risiko dampak penyimpangan iklim di sektor terkait. Berdasarkan hasil pemantauan perkembangan iklim di wilayah Kepulauan Indonesia, Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, dapat disampaikan sebagai berikut:

Kondisi *El Niño-Southern Oscillation* di Samudra Pasifik dan *Indian Ocean Dipole* di Samudra Hindia:

- 1) Pemantauan terhadap anomali iklim global di Samudera Pasifik menunjukkan bahwa nilai indeks ENSO (*El Niño Southern Oscillation*) pada Februari 2026 sebesar -0,28 yang mengindikasikan ENSO berada dalam fase Netral dan fenomena La Nina Lemah telah berakhir (Lampiran Halaman 2).
- 2) Fenomena *Indian Ocean Dipole* (IOD) yaitu pemicu anomali iklim dari Samudra Hindia, saat ini juga berada pada fase Netral (indeks +0.4) (Lampiran Halaman 2).
- 3) Kondisi suhu muka laut di wilayah Indonesia pada Februari 2026 umumnya dalam kondisi Normal hingga Hangat dengan nilai anomali suhu permukaan laut antara -0,5°C hingga 2,0°C (Lampiran Halaman 2).
- 4) Terdapat peluang berkisar 50-60% bahwa Fenomena *El Nino* akan terjadi pada semester kedua tahun 2026. *El Nino* diketahui sebagai pemicu gangguan iklim dari Samudra Pasifik yang dapat menyebabkan berkurangnya curah hujan di Indonesia. Sementara itu, fenomena IOD diprediksi akan tetap dalam fase Netral hingga akhir tahun 2026 yang mengindikasikan tidak ada gangguan penyimpangan iklim dari Samudra Hindia (Lampiran Halaman 3).

Selanjutnya, kami sampaikan Prediksi Musim Kemarau 2026 yang terdiri atas beberapa informasi kunci, antara lain informasi Prediksi Awal Musim Kemarau, Puncak Musim Kemarau, Sifat Musim Kemarau dan Durasi Musim Kemarau selama periode Musim Kemarau 2026.

Awal Musim Kemarau 2026:

- 5) Awal musim kemarau di berbagai wilayah Indonesia terjadi dalam waktu yang tidak bersamaan. Dari total **699 Zona Musim (ZOM)** di Indonesia, terdapat **114 ZOM (16,3%)** yang akan memasuki musim kemarau pada bulan **April 2026**, yang meliputi pesisir utara Jawa bagian barat, pesisir utara dan selatan Jawa Tengah, sebagian besar D.I Yogyakarta, sebagian Jawa Timur, sebagian Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian kecil Sulawesi Selatan. Sementara itu, sebanyak **184 ZOM (26,3%)** akan memasuki musim kemarau pada bulan **Mei 2026**, meliputi Aceh bagian utara, sebagian Sumatera Utara, sebagian Riau, sebagian kecil Kepulauan Riau, sebagian Jambi, sebagian Sumatera Selatan, Lampung, sebagian besar Jawa, Bali bagian tengah, sebagian kecil Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah bagian tenggara, Kalimantan Selatan bagian barat, Sulawesi Selatan bagian barat, sebagian kecil Gorontalo, sebagian Maluku, Papua bagian timur, Papua Pegunungan, dan sebagian Papua Selatan. Sebanyak **163 ZOM (23,3%)** mulai memasuki musim kemarau pada bulan **Juni 2026**,

meliputi sebagian besar Aceh, sebagian Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, sebagian Jambi, sebagian Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, sebagian Sumatera Selatan, sebagian kecil Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi Utara, Gorontalo bagian utara, sebagian Sulawesi Barat, sebagian Sulawesi Tengah, sebagian kecil Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Tenggara, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat, dan Papua bagian timur (Lampiran Halaman 4).

Jika dibandingkan **terhadap rerata klimatologinya** (periode 1991-2020), **awal musim kemarau 2026** di Indonesia diprediksi lebih **MAJU** pada **325 ZOM (46,5%)**, **SAMA** pada **173 ZOM (24,7%)**, dan **MUNDUR** pada **72 ZOM (10,3%)**. Wilayah yang awal kemaraunya diprediksi **maju** yaitu sebagian kecil Aceh, sebagian Sumatera Utara, sebagian Riau, sebagian kecil Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu bagian selatan, sebagian Kepulauan Bangka Belitung, sebagian Lampung, Banten, DKI Jakarta, sebagian besar Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, sebagian kecil Jawa Timur, sebagian Bali, sebagian besar NTB, sebagian NTT, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat, sebagian kecil Papua Tengah, sebagian kecil Papua, Papua Pegunungan, dan sebagian Papua Selatan (Lampiran Halaman 5).

Durasi Musim Kemarau 2026:

- 6) Durasi Musim Kemarau 2026 di **400 Zona Musim (57,2%)** diprediksi akan **lebih panjang**/lama dari normalnya yaitu di sebagian besar Sumatera, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, sebagian besar Maluku Utara, Maluku, sebagian Papua Barat Daya, sebagian Papua Barat, Papua Pegunungan, dan sebagian Papua Selatan (Lampiran Halaman 6).

Wilayah dengan Musim Kemarau yang lebih kering dari kondisi normal:

- 7) Wilayah yang diprediksi akan mengalami musim kemarau **lebih kering** dari normalnya yaitu sebanyak **451 Zona Musim (64,5%)** adalah sebagian kecil Aceh, sebagian kecil Sumatera Utara, sebagian kecil Riau, sebagian Kepulauan Riau, sebagian Sumatera Barat, sebagian kecil Jambi, sebagian Bengkulu, Sumatera Selatan, sebagian Lampung, Jawa, Bali, NTB, NTT, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan sebagian kecil Pulau Papua (Lampiran Halaman 7).

Puncak Musim Kemarau 2026:

- 8) Sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi akan mengalami puncak musim kemarau 2026 pada bulan Juli yaitu sebanyak 88 ZOM (12,6%), pada bulan **Agustus yaitu sebanyak 429 ZOM (61,4%)**, dan pada September 2026 yaitu sebanyak 100 ZOM (14,3%). Wilayah dengan Puncak Kemarau pada bulan Agustus 2026 adalah Sumatera bagian tengah dan selatan, Jawa bagian tengah hingga timur, Bali, NTB, sebagian NTT, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, sebagian Maluku, Maluku Utara, dan sebagian Pulau Papua (Lampiran Halaman 8).

Kewaspadaan terhadap potensi kekeringan saat Musim Kemarau 2026:

- 9) Dengan mempertimbangkan sebagian besar Zona Musim akan mengalami kemarau yang lebih kering (Bawah Normal), yang mengindikasikan adanya potensi defisit curah hujan yang signifikan, diperlukan peningkatan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan meteorologis dan hidrologis, penurunan ketersediaan sumber daya air, gangguan terhadap sektor pertanian, serta meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan, khususnya pada wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi.

Rekomendasi umum untuk Musim Kemarau 2026:

- 10) Berdasarkan pemantauan kondisi iklim yang dirangkum di atas, BMKG merekomendasikan kepada Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, masyarakat, serta pihak-pihak terkait beberapa hal sebagai berikut:
 - a. **Sektor Pangan:** Menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas tanaman yang membutuhkan lebih sedikit air, lebih tahan kekeringan, serta memiliki siklus tanam yang lebih pendek.



- b. **Sektor Sumber Daya Air:** Melakukan revitalisasi waduk, memperbaiki jaringan distribusi air, serta memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat.
- c. **Sektor Energi:** Memastikan kapasitas air bendungan untuk operasional PLTA.
- d. **Sektor Lingkungan:** Menyiapkan mekanisme respons cepat oleh pemerintah daerah untukantisipasi menurunnya kualitas udara.
- e. **Sektor Kehutanan dan Kebencanaan :** Kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan dan kejadian kebakaran hutan dan lahan.
- f. Terus memonitor media informasi BMKG (melalui *website*, media sosial, dan aplikasi *InfoBMKG*) untuk mendapatkan informasi mutakhir dan terupdate terkait kondisi cuaca dan iklim terkini, termasuk Musim Kemarau 2026 dan perkembangannya, atau dengan menghubungi secara langsung Kantor Pusat BMKG di Jakarta atau UPT BMKG yang tersebar di seluruh Provinsi.

Kami berharap informasi Prediksi Musim Kemarau 2026 yang disajikan secara lengkap ini dapat digunakan Pimpinan Kementerian/Lembaga dan seluruh jajaran sebagai salah satu panduan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan pada sektor yang berkaitan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG



Ardhasena Sopaheluwakan



Lampiran Surat :
Nomor : e.T/KL.00.02/008/DK/III/2026
Tanggal : 16 Maret 2026

DAFTAR TUJUAN SURAT

1. **Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian**
 - a. Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi
2. **Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**
 - a. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial
3. **Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan**
 - a. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar
 - b. Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman
4. **Kementerian Koordinator Bidang Pangan**
 - a. Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan
 - b. Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian
 - c. Deputi Bidang koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan
5. **Kementerian Keuangan**
 - a. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan
 - b. Direktur Jenderal Pembiayaan dan Risiko
6. **Kementerian Kesehatan**
 - a. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit
 - b. Direktur Jenderal Kesehatan lanjutan
 - c. Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
7. **Kementerian Sosial**
 - a. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
8. **Kementerian Perdagangan**
 - a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
9. **Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral**
 - a. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi
10. **Kementerian Pekerjaan Umum**
 - a. Direktur Jenderal Sumber Daya Air
 - b. Direktur Jenderal Prasarana Strategis
 - c. Direktur Jenderal Perumahan
 - d. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
11. **Kementerian Perhubungan**
 - a. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
 - b. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
 - c. Direktur Jenderal Perhubungan Udara
 - d. Kepala Badan kebijakan Transportasi



12. Kementerian Pertanian

- a. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
- b. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
- c. Direktur Jenderal Tanaman Pangan
- d. Direktur Jenderal Hortikultura
- e. Direktur Jenderal Perkebunan
- f. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian

13. Kementerian Kehutanan

- a. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
- b. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
- c. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari

14. Kementerian Lingkungan Hidup

- a. Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan
- b. Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon

15. Badan Pangan Nasional

- a. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
- b. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi

16. Kementerian Kelautan dan Perikanan

- a. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

17. Kementerian Pariwisata

- a. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur

18. Kementerian Ekonomi Kreatif

- a. Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif

19. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

- a. Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup

20. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

- a. Deputi Bidang Pencegahan

21. Badan Informasi Geospasial

- a. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik

22. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

- a. Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan

